



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 39 TAHUN 2019**

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KEUANGAN
TAHUN 2020**

Sarilamak, Agustus 2019

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota telah berhasil menyelesaikan penyusunan dokumen Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2020.

Renja PD ini disusun untuk dijadikan pedoman dan acuan bagi setiap elemen Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai pelaksana fungsi penunjang bidang keuangan serta tugas pembantuan dalam melaksanakan aktifitas, sehingga rencana penerimaan (target) yang telah ditetapkan dapat terpenuhi. Dan merupakan bentuk komitmen penuh organisasi untuk mencapai kinerja yang sebaik-baiknya dalam mewujudkan visi Kabupaten Lima Puluh Kota, yakni "Terwujudnya Keuangan Daerah yang Transparan dan Akuntabel". Dengan demikian, dokumen Renja PD Tahun 2020 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen-dokumen yang lain, seperti Rencana Strategis Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Usaha maksimal telah dilakukan dalam penyusunan dokumen Renja PD Tahun 2020 ini, namun kami menyadari bahwa dokumen ini masih jauh dari sempurna dan memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan lebih lanjut di masa mendatang. Oleh karena itu, masukan-masukan positif dan konstruktif bagi penyempurnaan dokumen ini tetap diperlukan.

Akhirnya semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam melaksanakan tugas-tugas ke depan.

Sarilamak, Agustus 2019

**KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



IRWANDI.S.Sos.MM

NIP. 19660913 198603 1 009

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU.....	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan.....	12
BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	17
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota.....	17
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	27
4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2020	
BAB V : PENUTUP	38

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Renstra Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota	7
Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota	13
Tabel 3.1. Program dan Kegiatan yang ada pada setiap OPD	23
Tabel 3.2. Program dan Kegiatan lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah	24
Tabel 3.3. Program dan Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan	26
Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2019	27

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

NOMOR : 900 / / BK-LK / 2019

TANGGAL : JULI 2019

HAL : RENCANA KERJA BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA
PULUH KOTA TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah., Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Semua jenis perencanaan ini merupakan dokumen perencanaan di tingkat kabupaten, sedangkan untuk tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga dilakukan penyusunan perencanaan, yaitu Rencana Strategis OPD (Renstra-OPD) dengan ruang lingkup waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja OPD (Renja-OPD) dengan ruang lingkup waktu 1 (satu) tahun.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, Badan Keuangan juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Badan Keuangan (Renja-BK). Renja Badan Keuangan Tahun 2020 mengacu kepada visi misi Bupati terpilih.

Penyusunan RPJMD ini dilaksanakan dalam rangka menjabarkan RPJPD , penyusunan RPJMD ini didasari oleh visi dan misi serta program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Selanjutnya penyusunan RPJMD ini merupakan penyusunan RPJMD tahap ke dua dalam ruang lingkup RPJPD 2005-2025.

Pada tingkatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 ini secara lebih teknis dan operasional dijabarkan kedalam Renstra OPD, dimana muatan yang terkandung dalam Renstra adalah visi dan misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh OPD sesuai

dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing selama lima tahun kedepan. Program dan Kegiatan OPD tersebut tentunya merupakan pelaksanaan sebagian kebijakan dan program Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota 2016-2021.

Terkait dengan Renstra OPD tersebut, maka Badan Keuangan telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra Badan Keuangan) Tahun 2016-2021.

Selanjutnya sebagai salah satu OPD dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota , Badan Keuangan juga perlu menyusun perencanaan tahunan, yaitu berupa Rencana Kerja Badan Keuangan (Renja Badan Keuangan). Renja Badan Keuangan ini merupakan penjabaran dari Renstra Badan Keuangan. Oleh karena itu, sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa setelah RKPD ditetapkan , Kepala OPD harus segera menetapkan Renja OPD masing-masing, Maka Badan Keuangan harus segera menyusun dan menetapkan Renja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah bebrapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun

2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7);

14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua Pembentukan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2008 Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2013 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2020 (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Badan Keuangan ini adalah untuk :

1. Menjabarkan visi, misi dan program Badan Keuangan secara operasional dan teknis sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Menjabarkan program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKPD 2019 sesuai dengan urusan dan kewenangan Badan Keuangan.

3. Menyediakan suatu acuan dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan Badan Keuangan untuk Tahun 2020.

Berkaitan dengan maksud di atas Rencana Kerja Badan Keuangan ini ditujukan untuk:

1. Memudahkan seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Keuangan dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Tahun 2020.
2. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan dan pengawasan program dan kegiatan sesuai dengan kewenangan dan tupoksi sekretariat dan bidang-bidang di Badan Keuangan..
3. Menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Badan Keuangan pada Tahun 2020.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Badan Keuangan Tahun 2020 ini terdiri dari beberapa Bab sebagai berikut:

- a. Kata Pengantar dari Kepala OPD.
- b. Perbup Nomor 39 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2019 (terlampir).
- c. Daftar Isi.
- d. Daftar Tabel.
- e. BAB I Pendahuluan
- f. BAB II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu
- g. BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah
- h. BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah
- i. BAB V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Tahun Lalu dan Capaian Renstra Badan Keuangan.

Dalam Bab ini dimuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Badan Keuangan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Keuangan tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan tahun lalu, dan realisasi Renstra Badan Keuangan mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan badan Keuangan dan/atau realisasi APBD untuk Badan Keuangan.

Berdasarkan hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Badan Keuangan tahun lalu dan pencapaian kinerja Renstra badan Keuangan, maka rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan dan Pencapaian Renstra Badan Keuangan sampai dengan Tahun 2018 dapat disajikan sebagaimana terlihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Keuangan Renstra Badan Keuangan s/d Tahun 2020

Kabupaten Lima Puluh Kota

Nama SKPD : BADAN KEUANGAN

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021 (Akhir Periode Renstra)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran s/d Tahun 2019	Target Kinerja Renja Tahun 2020	Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Triwulan IV tahun 2019		Capaian Target Renja s/d Triwulan IV Tahun 2019		KET
					Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9 = (5+7)	10=(9/4)	17
Wajib									
Otonomi daerah, Pem Umum, Adm keu, Perangkat daerah dan Persandian									
Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya pelayanan administrasi perkantoran								
Penyediaan jasa surat menyurat	Terkirimnya surat dan dokumen administrasi perkantoran	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	Terbiayainya rekening telepon, listrik, air dan internet	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terselenggaranya administrasi keuangan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyediaan ATK	Terpenuhinya ATK	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyediaan barang cetak penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan keperluan kantor	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan ktr	Tersedianya alat listrik dan instalasi listrik yang baik	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Tersedianya Peralatan dan perlengkapan kantor	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyediaan peralatan rumah tangga	Tersedianya peralatan rumah tangga	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	

Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersediaya bahan bacaan dan peraturan perundangan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk kebutuhan tamu, rapat dan pegawai	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran								
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	Tersedianya kendaraan dinas roda 4 dan roda 2	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya laptop, printer, infocus dan peralatan kantor lainnya	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Pengadaan mebeleur	Tersedianya Barang- barang mebeleur kantor	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor DPPKAD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas	Terpeliharanya secara berkala kendaraan dinas/operasional	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Pemeliharaan rutin berkala peralatan gedung kantor	Terpeliharanya secara berkala peralatan gedung kantor	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Pembuatan Taman di Halaman Gedung	Terlaksananya Pembuatan Tempat Parkir, Taman/Vaping Blok dan Dam Bagian Belakang	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	
Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat disiplin aparatur								
Pengadaan pakaian dinas	Terpenuhinya pakaian dinas pegawai DPPKAD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur									
Bimtek implementasi peraturan perundang-undangan	Terikutinya Bimtek ttg pengelolaan keuangan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Sosialisasi peraturan Perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan								
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersusunnya Laporan capaian fisik dan keuangan, Lakip, Penetapan Kinerja	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	

Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	Tersusunnya laporan keuangan semesteran Pemda, Laporan bulanan penerimaan, Laporan bulanan pengeluaran	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA DPPKAD . RKA, DPA, DPPA PPKD, Prognosis Keuangan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyusunan Pelaporan Akhir Tahun	Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah								
Penyusunan Analisa standar Belanja	Tersusunnya Dokumen Analisa Standar Belanja	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyusunan Standar Satuan Harga	Tersusunnya Buku pedoman daftar harga satuan barang dan standar biaya	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	Tersusunnya Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyusunan Rancangan Perda Tentang APBD	Tersusunnya Perda tentang APBD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang APBD	Tersusunnya Peraturan Kdh tentang penjabaran APBD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyusunan Rancangan Perda Tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Perda Tentang Perubahan APBD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Perubahan APBD	Tersusunnya Peraturan Kdh tentang penjabaran Perubahan APBD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Rancangan peraturan Kdh tentang Penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	Terlaksananya Sistem informasi keuangan daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	Terlaksananya sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	

Peningkatan Manajemen Aset/Barang Daerah	terlaksananya penghapusan barang daerah, tersusunnya buku daftar kebutuhan barang, terlaksananya Bimtek pengelolaan barang milik daerah, terlaksananya pemutakhiran data dan labeling barang daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	Tersusunnya Pedoman dan kebijakan investasi daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber- sumber Pendapatan Daerah	Tercapainya target penerimaan daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan Pendapatan Lain-lain	Tercapainya realisasi PBB dan pendapatan lainnya	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyusunan standarisasi sarana dan prasarana	Tersusunnya Perbup tentang Pedoman dan Tata Cara pemakaian sarana dan prasarana barang daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD	Tersusunnya Dokumen pelaksanaan perubahan APBD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD	Tersusunnya Dokumen pelaksanaan APBD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Rekonsiliasi Data Akuntansi	Tersediannya Data keuangan yang akuntabel	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Pemuktahiran data aset daerah	Terlaksananya laporan keuangan daerah dan inventarisasi data-data serta sosialisasi pengelolaan BMD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah	Terlaksananya sistem informasi manajemen aset daerah yang akuntabel	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyusunan perencanaan barang milik daerah	tersusunnya buku RKBMD, RKPBM, DKBMD dan DKPBMD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2016 Ttg Penetapan Status Pengguna BMD	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penetapan pajak dan retribusi	erlaksananya pemungutan pajak dan retribusi daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Koordinasi dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah	terciptanya jenis penerimaan daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismop	erlaksananya program dan pengembangan aplikasi	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Monitoring dan rekonsiliasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak	Terlaksananya data potensi bagi hasil pajak dan bukan pajak	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Pendataan, Pemuktahiran dan pengembangan data potensi pajak dan retribusi	terciptanya data2 pjg dan retr daerah scr akurat & lengkap shg memudahkan utk pemungutan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	
Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang pendapatan daerah (penagihan)	Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pendapatan daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	20%	

Intensifikasi dan Ektensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah	Terlaksananya pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Penyusunan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah	Terlaksananya penyusunan ranperda/ ranperbup pajak dan retribusi	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	Terlaksananya penyusunan laporan keuangan daerah 2016, terlaksananya penyampaian laporan keuangan daerah, terlaksananya konsultasi tentang penyusunan laporan keuangan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Penyusunan KUA dan PPAS	tersusunnya KUA dan PPAS tahun anggaran 2019 dan KUA -P dan PPAS-P Tahun Anggaran 2018	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Penyusunan Rancangan Kebijakan Anggaran Daerah	Tersusunnya SE pedoman penyusunan RKA, Perbup dan SK perjalanan dinas.	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota	pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota								
Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya penatausahaan keuangan pemerintah kabupaten lima puluh kota	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya tim anggaran pemerintah daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Penyuluhan Pajak Daerah	: Aparatur pemerintahan nagari dan wajib pajak paham tentang pajak daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapata Daerah	Terfasilitasinya tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan pendapatan lainnya	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru	Terpenuhinya permintaan data tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, DAK dan DBH	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran DAU,DAKdan DBH	Tersedianya laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran untuk Pemda dan Pemerintah Pusat	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota	Tersedianya data gaji PNSD pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota, tersedianya data potongan	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Pembinaan dan penerbitan pajak daerah	Terselenggarakan pembinaan dan penerbitan pajak daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Pemeriksaan Pajak Daerah	Terlaksananya pemeriksaan pajak daerah	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%
Bimbingan Teknis Pajak Daerah Untuk Kolektor PBB Nagari dan Jorong	Kolektor PBB di Nagari dan Jorong paham dan mengerti tentang PBB	100%	80%	20%	20%	100%	100%	100%	20%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Keuangan

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi Badan Keuangan sebagai salah satu OPD dalam lingkup Kabupaten Lima Puluh Kota, serta ditentukan pula dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Badan Keuangan sudah menyusun dan mempunyai tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, sehingga perlu dijelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan tersebut sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan.

Pencapaian kinerja Badan Keuangan pada tahun 2019 disajikan dalam tabel analisis pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Keuangan
Kabupaten Lima Puluh Kota
Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Reakisasi	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	WTP		Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	94.304.100
			WTP		Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	94.304.100
			WTP		Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	4.376.442.739
			WTP		Kegiatan : Penyusunan Analisa Standar Belanja	63.108.444
			WTP		Kegiatan : Penyusunan Standar Satuan Harga	35.359.500
			WTP		Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	114.804.800
			WTP		Kegiatan : Penyusunan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	73.083.670
			WTP		Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	174.704.200
			WTP		Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran APBD	101.101.275
			WTP		Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD	143.328.625
			WTP		Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD	159.010.225
			WTP		Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	130.215.800
			WTP		Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan KDH Tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan APBD	122.023.000
			WTP		Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Keuangan Daerah	71.075.400
			WTP		Kegiatan : Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	962.192.000
			WTP		Kegiatan : Peningkatan Manajemen Aset/ Barang Daerah	400.969.421
			WTP		Kegiatan : Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	72.633.000
			WTP		Kegiatan : Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana	67.875.885
			WTP		Kegiatan : Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan APBD	59.499.000
			WTP		Kegiatan : Penyusunan Dokumen Pelaksanaan APBD	58.965.500
			WTP		Kegiatan : Rekonsiliasi Data Akuntansi	28.196.300
			WTP		Kegiatan : Pemuktahiran Data Aset Daerah	623.072.989
			WTP		Kegiatan : Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah	88.845.845
			WTP		Kegiatan : Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah	60.844.905

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Reakisasi	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
			WTP		Kegiatan : Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	449.768.000
					Kegiatan : Penyusunan KUA dan PPAS	146.992.038
			WTP		Kegiatan : Penyusunan Rancangan Kebijakan Anggaran Daerah	168.772.904
			WTP		Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	1.760.136.081
			WTP		Kegiatan : Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	1.380.060.000
			WTP		Kegiatan : Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan DBH	92.521.770
			WTP		Kegiatan : Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH	194.508.622
			WTP		Kegiatan : Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota	93.045.689
		Rasio PAD terhadap pendapatan daerah	1 : 0,8		Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.584.318.175
			1 : 0,8		Kegiatan : Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	125.244.298
			1 : 0,8		Kegiatan : Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismiop	931.796.800
			1 : 0,8		Kegiatan : Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	55.556.985
			1 : 0,8		Kegiatan : Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi	78.846.829
			1 : 0,8		Kegiatan : Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pendapatan Daerah (Penagihan)	95.909.550
			1 : 0,8		Kegiatan : Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	203.206.313
			1 : 0,8		Kegiatan : Penyusunan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	43.877.900
			1 : 0,8		Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	49.879.500
			1 : 0,8		Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	424.798.000
			1 : 0,8		Kegiatan : Penyuluhan Pajak Daerah	130.394.000
			1 : 0,8		Kegiatan : Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah	102.564.000
			1 : 0,8		Kegiatan : Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah	80.553.000
			1 : 0,8		Kegiatan : Pemeriksa Pajak Daerah	62.535.000
			1 : 0,8		Kegiatan : Bimbingan Teknis Pajak Daerah untuk Kolektor PBB Nagari dan Jorong	48.752.000

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Reakisasi	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan OPD Pengelolaan Keuangan Daerah dan Arsip	Skor IKM Badan Keuangan	77,41		Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	261.229.500
			77,41		Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	261.229.500
			77,41		Program : Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	84.178.765
			77,41		Kegiatan : Penetapan Pajak dan Retribusi	84.178.765
			77,41		Program : Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	1.699.942.200
			77,41		Kegiatan : Asistensi Penyusunan Rancangan Regulasi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1.699.942.200
		Nilai Akuntabilitas Kinerja Badan Keuangan	66		Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.071.753.963
			66		Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	27.937.350
			66		Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	173.880.000
			66		Kegiatan : Penyediaan Alat Tulis Kantor	143.469.900
			66		Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	177.160.200
			66		Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Kantor	30.792.825
			66		Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.092.125
			66		Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	24.150.000
			66		Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.683.063
			66		Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman	191.257.500
			66		Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah	275.331.000
			66		Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.829.828.330
			66		Kegiatan : Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional	262.500.000
			66		Kegiatan : Pengadaan Peralatan Gedung kantor	816.716.250
			66		Kegiatan : Pengadaan Mebeleur	421.575.000
			66		Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor	696.780.000
			66		Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	176.169.000
			66		Kegiatan : Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor	73.500.000
			66		Kegiatan : Pembuatan Taman di Halaman Gedung	382.588.080

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Reakisasi	Program / Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7
			66		Program : Peningkatan Disiplin Aparatur	57.356.250
			66		Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas	57.356.250
			66		Program : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	598.500.000
			66		Kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	84.000.000
			66		Kegiatan : Bimtek Implementasi Peraturan Perundang-undangan	514.500.000
			66		Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	108.113.250
			66		Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	44.730.000
			66		Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran	54.547.500
			66		Kegiatan : Penyusunan Pelaporan Akhir tahun	8.835.750
					Jumlah	14.950.901.353

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Provinsi Sumatera Barat dan Kabupaten Lima Puluh Kota

3.1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional tahun 2019 sebagaimana arahan Presiden terkait penyusunan RKP tahun 2019 memuat tentang tema RKP tahun 2019 adalah :

“Memacu Pembangunan Infrastruktur dan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesempatan Kerja serta Mengurangi Kemiskinan dan Kesenjangan Antar Wilayah”

Prioritas pembangunan disusun sebagai penjabaran operasional dari strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2016-2021 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita yaitu :

- Cita 1 : Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- Cita 2 : Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya:
- Cita 3 : Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan;
- Cita 4 : Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi bermartabat dan terpercaya
- Cita 5 : Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia
- Cita 6 : Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional
- Cita 7 : Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik

Cita 8 : Melakukan revolusi karakter bangsa dan;

Cita 9 : Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat untuk mendukung tema RKP Nasional tahun 2019 ini antara lain :

1. Anggaran negara harus berorientasi mamfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan nasional
2. Kebijakan anggaran belanja yang dilakukan tidak berdasarkan money follow function tetapi moner program prioritas. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (fusi) harus dibiayai secara merata
3. Memangkas program yang nomenklaturnya tidak jelas dan tidak ada mamfaatnya bagi rakyat. Semua nomenklatur proyek harus jelas, misalnya membeli jaring, membeli benih dan seterusnya.

Pendekatan Pembangunan yang akan dilaksanakan adalah Holistik, Tematik, Terintegritas, dan Spasial.

- **Holistik- Tematik.** Untuk mencapai sasaran prioritas nasional Kedaulatan Pangan, perlu koordinasi multi kementrian, yaitu antara lain Kementan, KemenPUPR, Kemen ATR, dan Kemen KLH, Kemen Perdagangan serta Pemerintah Daerah.
- **Integratif.** Pencapaian Kedaulatan Pangan perlu dilakukan secara integrasi melalui peningkatan produktifitas laha existing, menyetop konversi lahan produktif reforma agraria, pencetakan sawah baru, pengembangan pertanian organik, pengendalian harga dan inport pangan dan seterusnya (kombinasi berbagai program/kegiatan)
- **Spasial.** Pembangunan sawah baru misalnya, harus mempertimbangkan lokasi, berdekatan dengan irigasi, terintegrasidengan jalan, gudang, pasar, dan lain-lain

3.1.2. Telaahan terhadap kebijakan Provinsi Sumatera Barat

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat. Oleh karena itu pembangunan Sumatera Barat juga sangat dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan di Kabupaten lima Puluh Kota. Untuk itu Pembangunan di Kabupaten Lima Puluh Kota harus bisa disinkronkan dengan pembangunan di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut maka dalam penyusunan Renja ini Badan Keuangan perlu melakukan telaahan terhadap kebijakan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Berdasarkan Background Study RPJMD tersebut telah di proyeksikan indikator kinerja makro daerah untuk tahun 2019 sebagai berikut :

- a. Indeks Pembangunan Manusia :
- b. Laju Pertumbuhan Ekonomi :
- c. PDRB Harga Berlaku :
- d. PDRB per Kapita :
- e. Rata-rata Lama Sekolah :
- f. Umur Harapan Hidup (UHH) :
- g. Tingkat Pengangguran :
- h. Tingkat Kemiskinan :

Disamping mengacu dan mempedomani proyeksi indikator kinerja makro daerah Sumatera Barat tersebut, dalam penyusunan Renja Badan Keuangan juga memperhatikan isu-isu strategis yang dimuat dalam Background Study RPJMD tersebut. Adapun isu-isu strategis adalah :

1. Ekonomi :

Ketimpangan pendapatan tinggi, pendapatan perkapita rendah, pengangguran tinggi, inflasi tinggi, kemiskinan tinggi

2. Keuangan Daerah :

Kinerja pemerintah dalam capaian PAD masih rendah, sinkronisasi antara belanja dan perencanaan belum sesuai dengan kebutuhan riil daerah

3. Pertanian :

Penguatan pembangunan pertanian berkelanjutan

4. Iklim Investasi Kondusif

Rendahnya kapasitas listrik, masalah pembebasan lahan, regulasi pendukung belum optimal, aksesibilitas transportasi rendah, resiko bencana relatif tinggi

5. Pendidikan :

Pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan

6. Kesehatan :

Angka kematian Ibu dan Bayi masih tinggi

7. Pemberdayaan Perempuan :

Keadilan dan kesetaraan Gender serta perlindungan Perempuan, Anak dan Lansia.

8. Permasalahan Sosial :

Kepemilikan lahan, keamanan, peningkatan SDM Aparatur Sipil Negara, Pembangunan berbasis nagari dan kebencanaan

9. Agama :

Belum adanya Perda yang mendukung kualitas hidup beragama

10. Transportasi :

Peningkatan Aksesibilitas sarana dan prasarana transportasi, pelayanan transportasi publik belum optimal, tingkat kecelakaan lalu lintas masih tinggi.

Oleh karena itu rencana kerja disusun oleh Badan Keuangan mesti disinkronkan dan dapat mendukung pencapaian prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Barat.

3.1.3. Telaahan terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota

Dengan dilantikannya Bupati terpilih pada tanggal 17 Februari 2016 maka kebijakan yang akan dituangkan dalam Renja badan Keuangan mengacu kepada Visi Misi Bupati Terpilih Kabupaten Lima Puluh Kota walaupun. Visi Kabupaten Lima Puluh Kota adalah **"Mewujudkan Kabupaten Lima Puluh Kota Sejahtera dan Dinamis 'Yang Mantap' Berlandaskan Iman dan Taqwa"**.

Sejahtera : diukur dari tingkat dan kemajuan daerah kearah yang tercermin dari indeks pendidikan, kesejahteraan daya beli, PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi

Dinamis : diukur dari perkembangan dan kemajuan daerah kearah yang lebih baik dari tahun ketahun, terutama yang berkaitan dengan semakin berkurangnya angka pengangguran dan penduduk miskin, meningkatnya laju investasi, serta bertambah baiknya kondisi ekonomi makro

Mantap : Maju, Amanah, Bermatabat, dan Berpendidikan

Iman dan Taqwa : diukur dari semakin baiknya etika dan moral masyarakat berdasarkan norma agama, norma hukum, norma adat dan kebiasaan yang berlaku daam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, yang tercermin pula dari kualitas kehidupan beragama serta kerukunan diantara umat beragama dan semakin kokohnya pelaksanaan filosofi " Adat bersendi Syarak, Syarak bersendi Kitabullah"

Adapun misi sebagai penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

1. Meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui revitalisasi perekonomian masyarakat berbasis pemamfaatan potensi daerah, peningkatan

- manajemen pengelolaan komoditas unggulan dan andalan serta pengembangan produktifitas bidang pertanian, perkebunan, perikanan dan sumber daya alam lainnya, dengan tetap memperhatikan daya dukung lingkungan.
2. Peningkatan perluasan lapangan kerja dan pemberantasan pengangguran melalui Gerakan Ekonomi Kerakyatan, Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Gerakan usaha dini mandiri, serta gerakan pemberdayaan perempuan, Gerakan Sayang Jumbo. Bank Tanah Nagari
 3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan secara murah dan bermutu, serta meningkatkan pemberdayaan Surau dan pondok pesantren sebagai salah satu soko guru peningkatan sumber daya manusia
 4. Peningkatan pelayanan publik dan Penciptaan iklim investasi yang didukung oleh optimalisasi pelayanan infra struktur daerah serta peningkatan kinerja pemerintah daerah berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
 5. Jaminan Penjenjangan karir dan kesejahteraan PNS dan Perangkat Nagari
 6. Peningkatan pembangunan berbasis jorong melalui revitalisasi pemerintahan dan lembaga-lembaga Nagari, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi nagari dan lumbung piti nagari sesuai dengan karakteristik potensi lokal
 7. Meningkatkan kehidupan beragama yang berorientasi pada kualitas peribadatan dan kerukunan antar umat beragama
 8. Mewujudkan keberadaan kota Sarilamak sebagai pusat pemerintahan dan pertumbuhan ekonomi

. Ringkasan Program dan Kegiatan DPPKAD pada tahun 2017 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut.

Tabel 3.1**Program dan kegiatan yang ada pada setiap OPD**

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	<ol style="list-style-type: none">1. Penyediaan jasa surat menyurat2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik3. Penyediaan jasa administrasi keuangan4. Penyediaan alat tulis kantor5. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor8. Penyediaan peralatan rumah tangga9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan10. Penyediaan makanan dan minuman11. Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
2.	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional2. Pengadaan peralatan gedung kantor3. Pengadaan mebeleur4. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional6. Pemeliharaan berkala/ peralatan gedung kantor7. Pembuatan Taman di Halaman Kantor
3.	Peningkatan disiplin aparatur	<ol style="list-style-type: none">1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	<ol style="list-style-type: none">1. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.

		2. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
5.	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 2. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 3. Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran 4. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
JML	5 Program	25 Kegiatan

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Peningkatan peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan analisa standar belanja 2. Penyusunan standar satuan harga 3. Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah 4. Penyusunan sisdur pengelolaan keuangan daerah 5. Penyusunan rancangan perda tentang APBD 6. Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 7. Penyusunan rancangan perda tentang perubahan APBD 8. Penyusunan rancangan peraturan kdh tentang penjabaran perubahan APBD 9. Penyusunan rancangan perda ttg pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 10. Penyusunan rancangan perda kdh tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

		<ol style="list-style-type: none"> 11. Penyusunan sistem informasi keuangan daerah 12. Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 13. Peningkatan manajemen aset/ barang daerah 14. Peningkatan manajemen Investasi daerah 15. Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana 16. Penyusunan dokumen pelaksanaan perubahan APBD 17. Penyusunan dokumen pelaksanaan APBD 18. Rekonsiliasi data akuntansi 19. Pemutakhiran data aset daerah 20. Sistem informasi manajemen aset daerah 21. Penyusunan perencanaan barang milik daerah 22. Penetapan pajak dan retribusi 23. Koordinasi dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah 24. Pengembangan dan pengelolaan aplikasi sismop 25. Monitoring dan rekonsiliasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak 26. Pendataan, pemuatahkiran dan pengembangan data potensi pajak dan retribusi 27. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang pendapatan daerah (penagihan 28. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi 29. Penyusunan regulasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah 30. Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah
--	--	---

		31. Penyusunan laporan keuangan daerah 32. Penyusunan KUA dan PPAS 33. Penyusunan Rancangan Kebijakan Anggaran Daerah
JML	1 Program	33 Kegiatan

Tabel 3.3

Program dan Kegiatan Pembinaan pengelolaan Keuangan

No	PROGRAM	KEGIATAN
1.	Program pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten / kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten / kota 2. Fasilitasi tim anggaran pemerintah daerah 3. Penyuluhan pajak daerah 4. Fasilitasi peningkatan kinerja tim intensifikasi PBB dan pendapatan daerah 5. Inventarisasi dan sinkronisasi data tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, DAK dan DBH 6. Rekonsiliasi dan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran DAU, DAK, DBH 7. Rekonsiliasi data belanja pegawai kabupaten Lima Puluh Kota 8. Pembinaan dan Penertiban Pajak daerah 9. Pemeriksaan pajak daerah 10. Bimbingan teknis pajak daerah untuk kolektor PBB, Nagari, dan Jorong
JML	1 Program	10 Kegiatan

Berdasarkan ketiga pengelompokan program tersebut maka untuk tahun 2019 Badan Keuangan melaksanakan 7 program dengan 67 kegiatan. Adapun mengenai uraian kegiatan berikut target kinerja dan indikasi anggaran program dan kegiatan Badan Keuangan Tahun 2020 secara lengkap dapat dibaca pada Tabel berikut.

BAB. IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

**4.1. RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2020
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2021
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

SKPD : BADAN KEUANGAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020 (TAHUN RENCANA/n)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021(N+1)				
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF			
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12			
1	Urusan : Wajib											
1	01	Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian										
1	01	01	Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran			1.332.983.463			1.399.632.636			
1	01	01	01	Penyediaan jasa surat menyurat	Perangko biasa (182 bh), perangko kilat (250 bh), materai 3000 (2000 bh), materai 6000 (2092), cek bank nagari (45 bh)	Badan Keuangan	66	27.937.350	APBD	4 (Sinergi pelayanan prima aparatur)	70,69	29.334.218
1	01	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Rekening telpon (12 bln), rekening air (12 bln) dan rekening listrik (12 bln)	Badan Keuangan	66	173.880.000	APBD	4 (Sinergi pelayanan prima aparatur)	70,69	182.574.000
1	01	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Administrasi keuangan, pelayanan belanja hibah bansos, transper nagari, bantuan keuangan kepihak lain (35 Dokumen)	Badan Keuangan	77,41	261.229.500	APBD	4 (Sinergi pelayanan prima aparatur)	80	274.290.975
1	01	01	10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Alat tulis kantor (12 bln)	Badan Keuangan	66	143.469.900	APBD	4 (Sinergi pelayanan prima aparatur)	70,69	150.643.395
1	01	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak (1 tahun), penggandaan (255.051 lbr), Penjilidan (1 tahun), Publikasi (tahun)	Badan Keuangan	66	177.160.200	APBD	4 (Sinergi pelayanan prima aparatur)	70,69	186.018.210
1	01	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Bola lampu (180 bh), saklar (80 bh), stop kontak (50 bh), fitting (50 bh), terminal lampu (20 bh), kabel (2 rol), batrai kecil (100 bh), batrai jam dinding (78 bh), batrai laptop (4 bh), charger laptop (5 bh)	Badan Keuangan	66	30.792.825	APBD	4 (Sinergi pelayanan prima aparatur)	70,69	32.332.466
1	01	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Flash Disk (50 bh), Mouse Biasa (19 bh), Mouse Wireless (28 bh), Kunci Laci Meja (36 bh), Spanduk (1 bh), Struktur Organisasi, Bendera (2 bh)	Badan Keuangan	66	23.092.125	APBD	4 (Sinergi pelayanan prima aparatur)	70,69	24.246.731

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020 (TAHUN RENCANA/n)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021(N+1)	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
1 01 01 14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Bahan pembersih dan alat dapur(1 paket)	Badan Keuangan	66	24.150.000	APBD	4 (Sinergi pelayanan prima aparatur)	70,69	25.357.500
1 01 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Korah harian (24 koran) , koran mingguan (23 koran)	Badan Keuangan	66	4.683.063	APBD	4 (Sinergi pelayanan prima aparatur)	70,69	4.917.216
1 01 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	Makan harian (1700 porsi) , Makan rapat (2999 porsi) , Makan tamu (5766 porsi)	Badan Keuangan	66	191.257.500	APBD	4 (Sinergi pelayanan prima aparatur)	70,69	200.820.375
1 01 01 18	Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BBM (1 tahun) , SPPD (1 tahun)	Badan Keuangan	66	275.331.000	APBD	4 (Sinergi pelayanan prima aparatur)	70,69	289.097.550
1 01 02	Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				2.829.828.330				2.990.449.151
1 01 02 05	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Kendaraan roda 4 (1 unit) , Roda 2 (2 unit)	Badan Keuangan	66	262.500.000	APBD	4 (Sinergi pelayanan prima aparatur)	70,69	275.625.000
1 01 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	UPS (10 unit) , Laptop (8 unit) , CPU+Monitor (5 unit) , Mesin Tik Manual (1 bh) , Komputer PC (10 unit) , Server (1 unit) , Alat Pembuat Kopi Instan (1 bh) , AC Berdiri (2 unit) , TV (1 unit) , Schalf Holding (1 bh) , Kalkulator (3 bh) , Printer (25 unit) , Eksternal Hardisk (1 bh) , Batrai Laptop (4 bh) , Hardisk (1 bh) , Parabola (1 bh)	Badan Keuangan	66	816.716.250	APBD	4 (Sinergi pelayanan prima aparatur)	70,69	857.552.063
1 01 02 10	Pengadaan mobeleur	Kursi Pejabat Eselon IV (5 bh) , Lemari Arsip (4 bh) , Meja Meeting (1 set) , Kursi Tamu (3 set) , Meja 1/2 Biro (2 bh) , Meja Kerja Staf (5 bh) , Rak Server (1 unit) , Lemari Arsip (4 bh) , Rak Koran (1 bh) , Kursi Kerja Staf (6 bh)	Badan Keuangan	66	421.575.000	APBD	4 (Sinergi pelayanan prima aparatur)	70,69	442.653.750
1 01 02 22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Belanja bahan material, belanja jasa pengamanan kantor, belanja jasa kebersihan kantor dan dinding	Badan Keuangan	66	696.780.000	APBD	4 (Sinergi pelayanan prima aparatur)	70,69	731.619.000

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020 (TAHUN RENCANA/n)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021(N+1)	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
1 01 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional	Service dan suku cadang kendaraan roda 2 dan roda 4, BBM roda 2 dan roda 4, perpanjangan STNK	Badan Keuangan	66	176.169.000	APBD	4 (Sinergi pelayanan prima aparatur)	70,69	184.977.450
1 01 02 28	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Service pemeliharaan komputer, server, printer, genset, CCTV, WC, Faximili, mesin tik, perforasi dan jaringan internet	Badan Keuangan	66	73.500.000	APBD	4 (Sinergi pelayanan prima aparatur)	70,69	77.175.000
1 01 02 56	Pembuatan Taman di Halaman Gedung	Pemasangan Paving Blok + Taman	Badan Keuangan	66	382.588.080	APBD	4 (Sinergi pelayanan prima aparatur)	70,69	420.846.888
1 01 03	Program : Peningkatan Disiplin Aparatur				57.356.250				60.224.063
1 01 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Pakaian dinas harian (106 stel)	Badan Keuangan	66	57.356.250	APBD	4 (Sinergi pelayanan prima aparatur)	70,69	60.224.063
1 01 05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				598.500.000				628.425.000
1 01 05 02	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi keuangan daerah (7 kali pelaksanaan)	Badan Keuangan	66	84.000.000	APBD	4 (Sinergi pelayanan prima aparatur)	70,69	88.200.000
1 01 05 03	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Bimbingan teknis keuangan daerah (16 kali), Bimbingan teknis luar daerah (7 kali pelaksanaan), Bimbingan teknis dalam daerah (6 kali pelaksanaan)	Badan Keuangan	66	514.500.000	APBD	4 (Sinergi pelayanan prima aparatur)	70,69	540.225.000
1 01 06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan				202.417.350				217.253.423
1 01 06 01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya Renstra (10 dok), LAJIP (10 dok), PK (10 dok), RKT (10 dok), IKU (10 dok), RAP (10 dok), LKPJ (10 dok), LPPD (500 lbr), EKPP (500 lbr), SIRUP (500 lbr), SPIP (500 lbr), Gender (500 lbr) dan laporan fisik bulanan badan keuangan (500 lbr)	Badan Keuangan	66	44.730.000	APBD	PP No. 58 Th 2005 dan Permendagri No. 13 Th 2006	70,69	46.966.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020 (TAHUN RENCANA/n)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021(N+1)	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
1 01 06 02	Penyusunan laporan keuangan semesteran	1. Laporan Pertanggungjawaban Bulanan (1 laporan) 2. Laporan Pertanggungjawaban Triwulan (1 laporan) 3. laporan Keuangan Semester (70 buku) 4. laporan Prognosis (70 buku)	Badan Keuangan	WTP	94.304.100	APBD	PP No. 58 Th 2005 dan Permendagri No. 13 Th 2006	WTP	103.734.510
1 01 06 03	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Tersusunnya Renja (10 dok), RKA/DPA-BK (15 dok), RKAP/DPA-PPKD (15 dok), RKAP/DPPA-PPKD (15 dok) dan laporan semesteran prognosis (100 lbr)	Badan Keuangan	66	54.547.500	APBD	PP No. 58 Th 2005 dan Permendagri No. 13 Th 2006	70,69	57.274.875
1 01 06 04	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Laporan keuangan Badan Keuangan (15 buku)	Badan Keuangan	66	8.835.750	APBD	PP No. 58 Th 2005 dan Permendagri No. 13 Th 2006	70,69	9.277.538
1 01 17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah				6.044.939.666				6.649.433.633
1 01 17 01	Penyusunan Analisa Standar Belanja	1. Peraturan Bupati Analisa Standar Belanja 2020 (1 dok) 2. Peraturan Bupati Standar Biaya 2020 (1 dok) 3. Surat Keputusan Kode Rekening (1 dok)	Badan Keuangan	WTP	63.108.444	APBD	Permendagri 13 Tahun 2006 Pasal 94 ayat (2), SK Tentang Tim Penyusunan SAB	WTP	69.419.289
1 01 17 02	Penyusunan standar satuan harga	Buku daftar harga satuan barang dan jasa (55 buku)	Badan Keuangan	WTP	35.359.500	APBD	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	WTP	38.895.450
1 01 17 03	Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah	1. Perubahan kebijakan akuntansi pemerintah daerah (60 buku) 2. Perubahan sistem akuntansi pemerintah daerah (60 buku) 3. Perubahan bagan akun standar pemerintah daerah (60 buku) 4. Konsultasi ke propinsi dan ke komite standar akuntansi pemerintah kementerian keuangan RI (2 kali) 5. Jasa konsultasi pendampingan revisi kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi (1 paket)	Badan Keuangan	WTP	114.804.800	APBD	PP No. 58 Th 2005 dan Permendagri No. 13 Th 2006, PP Nomor 71/2010.	WTP	126.285.280

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020 (TAHUN RENCANA/n)				CATATAN PENTING	PERKIRAAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021(N+1)	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
1 01 17 04	Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah	1. Peraturan Bupati (3 bh) 2. Surat Keputusan Bupati (68 SK) 3. Sosialisasi (3 kali) 4. Surat Edaran (12 bh)	Badan Keuangan	WTP	73.083.670	APBD	PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Permendagri Nomor 32 Tahun 2012, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012	WTP	80.392.037
1 01 17 06	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	1. Rancangan Perda APBD 2021 (150 buku) 2. Perda APBD 2021 (150 buku) 3. Nota Keuangan APBD 2021 (70 buku)	Badan Keuangan	WTP	174.704.200	APBD	PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab IV ttg Penyusunan Rancangan APBD, Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 100	WTP	192.174.620
1 01 17 07	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	1. Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021 (200 buku) 2. Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD 2021 (200 buku)	Badan Keuangan	WTP	101.101.275	APBD	PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab V ttg Penetapan APBD, Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 100	WTP	111.211.403
1 01 17 08	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD	1. Ranperda Tentang Perubahan APBD (150 buku) 2. Perda Tentang Perubahan APBD (150 buku) 3. Nota Keuangan (70 buku)	Badan Keuangan	WTP	143.328.625	APBD	PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VII Bagian Kedua ttg Perubahan APBD, Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 100	WTP	157.661.488
1 01 17 09	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	1. Rancangan Perda KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020 (300 buku) 2. Peraturan KDH Tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun 2020 (300 buku) 3. Peraturan Bupati tentang Pergeseran (60 buku)	Badan Keuangan	WTP	159.010.225	APBD	PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VII Bagian Kedua ttg Perubahan APBD, Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 100	WTP	174.911.248

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020 (TAHUN RENCANA/n)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021(N+1)	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
1 01 17 10	Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1. Ranperda tentang LPP APBD (60 buku) 2. Nota Penyampaian LPP APBD 2019 (60 buku) 3. Konsultasi ke Propinsi dan Pusat (4 kali) 4. Penyampaian Rancangan Perda LPP ke Propinsi (4 kali) 5. Penyampaian Evaluasi (1 kali) 6. Perda APBD 2019 (60 buku) 7. Penyampaian Perda LPP ke Pusat (1 kali)	Badan Keuangan	WTP	130.215.800	APBD	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.	WTP	143.237.380
1 01 17 11	Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	1. Ranperbup LPP Tahun 2019 (120 buku) 2. Penyampaian LPP Ranperda ke Propinsi (1 kali) 3. Penyampaian Hasil Evaluasi Gubernur (1 kali) 4. Penyampaian Perbup LPP ke Propinsi (1 kali) 5. Penyampaian Perbup LPP ke Pusat (1 kali) 6. Perbup LPP APBD 2019 (120 buku)	Badan Keuangan	WTP	122.023.000	APBD	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.	WTP	134.225.300
1 01 17 12	Penyusunan Sistem informasi keuangan daerah	Pelaporan pengelolaan keuangan daerah (12 bulan)	Badan Keuangan	WTP	71.075.400	APBD	PP 56 Tahun 2005 ttg SIKD dan PP 65 Th 2010 tentang Perubahan PP 56 Tahun 2005	WTP	78.182.940
1 01 17 13	Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	Ahli jaringan dan analisa system (1 orang), terlaksananya Bimtek E-Budgeting(1 kali pelatihan)	Badan Keuangan	WTP	962.192.000	APBD	PP 56 Tahun 2005 ttg SIKD dan PP 65 Th 2010 tentang Perubahan PP 56 Tahun 2005	WTP	1.058.411.200
1 01 17 16	Peningkatan manajemen aset/ barang daerah	Sertifikasi tanah 15 pensil, pancang tanah 34 buah, penghapusan 30 buah, penilaian gedung 30 buah	Badan Keuangan	WTP	400.969.421	APBD	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	WTP	441.066.363
1 01 17 17	Peningkatan Manajemen Investasi Daerah	1. Konsultasi tentang investasi daerah (5 kali) 2. Dokumentasi tentang investasi daerah (40 buku)	Badan Keuangan	WTP	72.633.000	APBD	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.	WTP	79.896.300
1 01 17 20	Penyusunan Standarisasi Sarana dan Prasarana	Standarisasi sarana dan prasarana (60 buku)	Badan Keuangan	WTP	67.875.885	APBD	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	WTP	74.663.474

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020 (TAHUN RENCANA/n)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021(N+1)	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
1 01 17 21	Penyusunan dokumen pelaksanaan perubahan APBD	Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Tahun 2019 (506 buku)	Badan Keuangan	WTP	59.499.000	APBD	PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI ttg Pelaksanaan APBD, Permendagri 13 Tahun 2006 pasal 100	WTP	65.448.900
1 01 17 22	Penyusunan dokumen pelaksanaan APBD	Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Tahun 2020 (506 buku) dan DPA Revisi Tahun 2020 (330 buku)	Badan Keuangan	WTP	58.965.500	APBD	PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Bab VI ttg Pelaksanaan APBD	WTP	64.862.050
1 01 17 23	Rekonsiliasi Data Akuntansi	1. Rekonsiliasi data akuntansi dengan OPD (6 kali) 2. Data keuangan yang akuntable (30 dok) 3. Rekonsiliasi data akuntansi data transper dengan pusat (2 kali) 4. Rekonsiliasi data akuntansi dengan propinsi (8 kali)	Badan Keuangan	WTP	28.196.300	APBD	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.	WTP	31.015.930
1 01 17 24	Pemuktahiran data aset daerah	1. Buku lampiran asset (20 buah) 2. Buku inventaris (20 buku) 3. laporan semester (10 buku) 4. laporan tahunan (10 buku)	Badan Keuangan	WTP	623.072.989	APBD	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	WTP	685.380.288
1 01 17 25	Sistem Informasi Manajemen Aset Daerah	Buku inventaris 15 buku	Badan Keuangan	WTP	88.845.845	APBD	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	WTP	97.730.430
1 01 17 27	Penyusunan Perencanaan Barang Milik Daerah	Penyusunan buku RKBMD, RKPMD dan status penetapan BMD (25 buku)	Badan Keuangan	WTP	60.844.905	APBD	Permendagri Nomor 19 Tahun 2016	WTP	66.929.396
1 01 17 28	Penetapan Pajak dan Retribusi Daerah	Penelitian terhadap wajib pajak dan wajib retribusi (2000 SKP)	Badan Keuangan	77,41	84.178.765	APBD	- UU Nomor 19 Tahun 2000 - UU Nomor 28 Tahun 2009 - PMK Nomor 24 /PMK.03/2008	80	92.596.642
1 01 17 29	Koordinasi dan Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Penggantian objek pajak dan retribusi (100%)	Badan Keuangan	1 : 0,8	125.244.298	APBD	- UU Nomor 19 Tahun 2000 - UU Nomor 28 Tahun 2009 - PMK Nomor 24 /PMK.03/2008	1 : 0,9	137.768.728

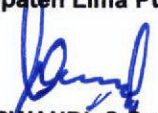
KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020 (TAHUN RENCANA/n)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021(N+1)	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
1 01 17 31	Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Sismop	Pendataan / Pemutakhiran data PBB P@ di IKK (32000 data PBB)	Badan Keuangan	1 : 0,8	931.796.800	APBD	- UU Nomor 19 Tahun 2000 - UU Nomor 28 Tahun 2009 - PMK Nomor 24 /PMK.03/2008	1 : 0,9	1.024.976.480
1 01 17 32	Monitoring dan Rekonsiliasi Penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	Rekon dengan instansi sektoral dan pemprof (6 dokumen)	Badan Keuangan	1 : 0,8	55.556.985	APBD	- UU Nomor 19 Tahun 2000 - UU Nomor 28 Tahun 2009 - PMK Nomor 24 /PMK.03/2008	1 : 0,9	61.112.684
1 01 17 33	Pendataan, Pemuktahiran dan Pengembangan Data Potensi Pajak dan Retribusi	Data objek pajak dan objek retribusi (45 objek pajak, 20 pemutakhiran)	Badan Keuangan	1 : 0,8	78.846.829	APBD	- UU Nomor 19 Tahun 2000 - UU Nomor 28 Tahun 2009 - PMK Nomor 24 /PMK.03/2008	1 : 0,9	86.731.512
1 01 17 34	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Pendapatan Daerah (Penagihan)	3 Ranperbup / 6 SK Keputusan	Badan Keuangan	1 : 0,8	95.909.550	APBD	UU Nomor 28 tahun 2009 Tenatng Pajak Daerah dan Retribusi	1 : 0,9	105.500.505
1 01 17 35	Intensifikasi dan Ektensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Realisasi pajak dan retribusi daerah (24 laporan)	Badan Keuangan	1 : 0,8	203.206.313	APBD	- UU Nomor 28 Tahun 2009 - Permendagri 13 Tahun 2006	1 : 0,9	223.526.945
1 01 17 36	Penyusunan Regulasi Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	12 Perbup dan 3 Surat Keputusan	Badan Keuangan	1 : 0,8	43.877.900	APBD	- UU Nomor 19 Tahun 2000 - UU Nomor 28 Tahun 2009 - PMK Nomor 24 /PMK.03/2008	1 : 0,9	48.265.690
1 01 17 37	Monitoring dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah (4 laporan)	Badan Keuangan	1 : 0,8	49.879.500	APBD	- UU Nomor 28 Tahun 2009 - Permendagri 13 Tahun 2006	1 : 0,9	54.867.450
1 01 17 38	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah	1. laporan keuangan daerah (100 buku) 2. Penyampaian laporan keuangan daerah ke BPK (1 kali) 3. Konsultasi tentang penyusunan laporan keuangan daerah (4 kali) 4. Bimtek penyusunan laporan keuangan ke OPD (2 kali) 5. Pendampingan penyusunan laporan keuangan daerah (1 paket)	Badan Keuangan	WTP	449.768.000	APBD	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, PP Nomor 71 Tahun 2010, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.	WTP	494.744.800

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020 (TAHUN RENCANA/n)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021(N+1)	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
1 01 17 39	Penyusunan KUA dan PPAS	1. KUA dan PPAS Tahun 2021 (2 dok) 2. KUA-P dan PPAS-P Tahun 2020 (2 dok) 3. Ranperda Ttg Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan	WTP	146.992.038	APBD	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, PP Nomor 71 Tahun 2010, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013.	WTP	161.691.241
1 01 17 40	Penyusunan Rancangan Kebijakan Anggaran Daerah	1. SE pedoman penyusunan RKA (1 dok) 2. Peraturan Bupati tentang Perjalanan Dinas (1 dok) 3. SK Perjalanan Dinas (2 dok) 4. Ranperda Ttg Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Keuangan	WTP	168.772.904	APBD	UU Nomor 23/2014 Bab XI Pasal 310 ayat 4	WTP	185.650.195
1 01 18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota				3.884.876.281				4.273.363.909
1 01 18 05	Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/ kota	1. Sosialisasi TNT (3 kali) 2. Asistensi Simgaji (12 bulan) 3. Sosialisasi tata kelola keuangan daerah (3 kali) 4. MOU lembaga perbankan serta lembaga keuangan lainnya (2 kali) 5. Workshop pengelolaan keuangan daerah (2 kali)	Badan Keuangan	77,41	1.699.942.200	APBD	PP 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah , Permendagri Nomor 13 tahun 2006, Permendagri Nomor 32 Tahun 2012, Permendagri Nomor 39 Tahun 2012, Permendagri Nomor 14 Tahun 2016.	80	1.869.936.420
1 01 18 06	Fasilitasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah	Terfasilitasinya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (12 bulan)	Badan Keuangan	WTP	1.380.060.000	APBD	Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 , SK Tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah	WTP	1.518.066.000
1 01 18 07	Penyuluhan Pajak Daerah	Aparatur pemerintahan nagari dan wajib pajak (untuk 320 orang)	Badan Keuangan	1 : 0,8	130.394.000	APBD	- UU Nomor 28 Tahun 2009 - Permendagri 13 Tahun 2006	1 : 0,9	143.433.400
1 01 18 09	Fasilitasi Peningkatan Kinerja Tim Intensifikasi PBB dan Pendapatan Daerah	Terfasilitasinya tim intensifikasi dan ekstensifikasi PBB dan pendapatan daerah (10 kali)	Badan Keuangan	1 : 0,8	102.564.000	APBD	- UU Nomor 28 Tahun 2009 - Permendagri 13 Tahun 2006	1 : 0,9	112.820.400

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020 (TAHUN RENCANA/n)				CATATAN PENTING	PERKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021(N+1)	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
1 01 18 10	<i>Inventarisasi dan Sinkronisasi Data Tunjangan Profesi Guru, Tambahan Penghasilan Guru, DAK dan DBH</i>	1. Data realisasi tunjangan profesi guru (4 triwulan) 2. Data realisasi tambahan penghasilan guru (4 triwulan) 3. Data realisasi tunjangan khusus guru (4 triwulan) 4. Data realisasi DAU (2 semester) 5. Data realisasi DAK (2 semester) 6. Data realisasi DBH (2 semester)	Badan Keuangan	WTP	92.521.770	APBD	PMK Nomor 50/PMK/2017, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2017.	WTP	101.773.947
1 01 18 11	<i>Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran DAU, DAK dan DBH</i>	1. Laporan realisasi transper (12 bln) 2. Laporan konfirmasi transper (12 bln) 3. laporan DAK (4 tahap) 4. Laporan DAU (2 semester) 5. Laporan posisi kas (12 bln) 6. Laporan rekonsiliasi Bank (12 bln) 7. Laporan IWP (12 bln) 8. laporan SSBH (12 bln) 9. Laporan DBH (2 semester)	Badan Keuangan	WTP	194.508.622	APBD	PMK Nomor 50/PMK/2017.	WTP	213.959.484
1 01 18 12	<i>Rekonsiliasi Data Belanja Pegawai Kabupaten Lima Puluh Kota</i>	1. Rekonsiliasi data belanja pegawai (2 semester) 2. Rekonsiliasi SSBP (4 tahap) 3. Rekonsiliasi JKK/JKM (4 tahap) 4. Rekonsiliasi IWP dan BPJS (4 tahap) 5. Rekonsiliasi kasda dengan Bank (12 bulan) 6. Rekonsiliasi DAU (2 semester) 7. Rekonsiliasi DAK (2 semester) 8. Rekonsiliasi DBH (2 semester)	Badan Keuangan	WTP	93.045.689	APBD	PMK Nomor 50/PMK/2017.	WTP	102.350.258
1 01 18 13	<i>Pembinaan dan Penertiban Pajak Daerah</i>	<i>Pembinaan dan penertiban pajak daerah (8 kali)</i>	Badan Keuangan	1 : 0,8	80.553.000	APBD	- UU Nomor 19 Tahun 2000 - UU Nomor 28 Tahun 2009 - PMK Nomor 24 / PMK.03/2008	1 : 0,9	88.608.300
1 01 18 14	<i>Pemeriksaan Pajak Daerah</i>	<i>Dokumen hasil pemeriksaan pajak (5 dokumen)</i>	Badan Keuangan	1 : 0,8	62.535.000	APBD	- UU Nomor 28 Tahun 2009 - PMK Nomor 17 / PMK.03/2013	1 : 0,9	68.788.500

KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	RENCANA TAHUN 2020 (TAHUN RENCANA/n)				CATATAN PENTING	PERKIRAAAN MAJU RENCANA TAHUN 2021(N+1)	
			LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF	SUMBER DANA		TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF
1	2	3	4	5	6	7	9	11	12
1 01 18 15	Bimbingan Teknis Pajak Daerah Untuk Kolektor PBB Nagari dan Jorong	Dokumen pelaksanaan Bimtek (6 kali)	Badan Keuangan	1 : 0,8	48.752.000	APBD	- UU Nomor 28 Tahun 2009 - Permendagri 13 Tahun 2006	1 : 0,9	53.627.200
JUMLAH					14.950.901.340				16.218.781.813

Sarilamak, Agustus 2019
KEPALA BADAN KEUANGAN
Kabupaten Lima Puluh Kota


IRWANDI, S.Sos.MM
NIP. 19660913 198603 1 009

BAB V

PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen pengelolaan keuangan di tingkat OPD ,Badan Keuangan telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis Badan Keuangan (Renstra Badan Keuangan) Tahun 2016-2021 yang memuat visi, misi, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Keuangan. Kemudian terkait dengan perencanaan tahunan daerah maka Pemerintah Kabupaten juga telah menetapkan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2020.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari kedua dokumen perencanaan di atas maka seluruh OPD perlu menyusun dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) masing masing. Sehubungan dengan ini maka Badan Keuangan juga menyusun dan menetapkan Rencana Kerja Badan Keuangan (Renja Badan Keuangan) Tahun 2020. Renja Badan Keuangan ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Keuangan ini sangat tergantung kepada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Keuangan. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Badan Keuangan, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Keuangan juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Badan Keuangan dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik dari segi tata kelola sumberdaya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan

maupun tata kelola peralatan/perlengkapan. Diharapkan pada awal tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2020, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rencana Kerja Badan Keuangan Kabupaten Lima Puluh kota Tahun 2020 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Badan Keuangan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

**KEPALA BADAN KEUANGAN
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**



**IRWANDI, S.Sos, MM
NIP. 19661013 199603 1 001**